

Ketum PP NA: Pelarangan Terhadap Iklan Rokok Merupakan Tantangan yang Harus Diselesaikan

Kamis, 03-08-2017

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Iklan rokok menjadi satu permasalahan yang hingga kini belum teratasi dengan optimal di Indonesia. Sikap pemerintah yang kurang tegas terhadap industri rokok menjadikannya leluasa untuk mempromosikan produknya dalam berbagai bentuk dengan tipu daya.

Hal ini membuat Pimpinan Pusat Nasiyatul Aisyiyah (PP NA) resah akan masa depan generasi bangsa bila terus menerus dijejali bahaya dari iklan rokok. Bersama dengan *Indonesian Institute for Social Development* (IISD), PPNA menggelar sebuah Diskusi Penyiaran bertajuk “*Selamatkan Generasi Bangsa: Tolak Iklan Rokok*”, Selasa (1/8).

“Ketika perempuan Indonesia bisa sehat dan bebas rokok maka dapat dijamin bahwa generasi muda Indonesia dalam empat atau sepuluh tahun mendatang akan jauh lebih baik,” papar Diyah Puspitarini, Ketua Umum PPNA dalam sabutannya.

Hanya saja, lanjut Diyah, untuk mengatasi agar kaum perempuan dan anak tidak merokok salah satunya ialah dengan melakukan pelarangan iklan rokok dimanapun. Dengan ini setiap orang akan berkurang ketertarikannya terhadap rokok.

“Maka persoalan mengenai pelarangan terhadap iklan rokok merupakan sebuah tantangan yang harus diselesaikan sehingga Indonesia terbebas dari jeratan industri rokok,” papar Diyah.

Sementara itu Deni Wahyudi Kurniawan, Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau, mengatakan bahwa saat ini perempuan merupakan salah satu target dan korban utama dari rokok.

Kita tahu bahwa prevalensi perokok laki-laki sekarang sudah 47% artinya 2 dari tiga orang perokok sudah jenuh (merokok), sementara perempuan kenaikannya sangat tinggi, dalam 5 atau 10 tahun terakhir kenaikannya hingga 400%, dari yang tadinya 1,5% menjadi 4,5%.

“Sehingga komitmen dan peran PP Nasiyatul Aisyiyah berbicara mengenai hal ini adalah sangat penting dan strategis,” papar Deni yang juga program manager IISD ini.

Upaya pengendalian tembakau merupakan jalan terjal, karena intervensi industri rokok datang dari mana-mana, di sisi lain pemerintah saat ini meski mendukung pengendalian tembakau namun sepertinya masih bimbang antara harus mempertimbangkan aspek ekonomi atau kesehatan masyarakat.

Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN bahkan Asia yang belum menerapkan peraturan pelarangan iklan rokok. Maka dari itu Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau mengharapkan dukungan publik agar Komisi I DPR RI bisa konsisten mempertahankan larangan iklan rokok dalam penyiaran.

“Kita berharap bisa bergabung bersama negara-negara lain – 140 negara di dunia - menjadi bagian dari negara yang pro terhadap kesehatan masyarakat, pro terhadap kepentingan publik dan melakukan pelarangan iklan rokok seperti dilakukan oleh negara lain,” pungkas Deni.

Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi tersebut diantaranya, Khotimun Sutanti PP Nasiyatul Aisyiyah,

Muhammad Heychael Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran, Hanafi Rais Komisi I DPR RI dan dan Rita Pranawati KomisionerKPAI. **(raipan)**